



RANWAL 2023

RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**

Jl. Batanghari 108 Padang Harapan - Bengkulu
telp. 0736 22044
www.dpmptsp.bengkuluprov.o.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu Tahun 2023. RENJA yang kami susun ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 dan pelaksanaan RENJA Perubahan tahun 2021 sampai dengan Semester Pertama serta capaian RENSTRA 2021, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Provinsi Bengkulu, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan di Provinsi Bengkulu dengan kepentingan nasional untuk jangka waktu sisa 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Bengkulu ini kiranya dapat memberikan arah, guna mencapai hasil yang lebih optimal lagi demi mewujudkan Pelayanan Prima dalam Perizinan dan Investasi.

Bengkulu, 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199203 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	34
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 DPMPTSP Provinsi Bengkulu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan/wilayah pada jangka waktu tertentu. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja OPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Fenomena yang ada dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain, seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran OPD. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pokok (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) Tahun yang sifatnya lebih operasional. Rencana

Kerja OPD yang akan disingkat dengan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Dimana Kebijakan, Program Kerja dan Kegiatan DPMPTSP yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 menjadi dasar dalam penyusunan Renja DPMPTSP tahun 2023 ini.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2023 ini dibuat dengan berpedoman pada landasan hukum berikut ini :

1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4)
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6)
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
18. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Startegis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 adalah untuk mempertimbangkan arah dan kebijakan umum yang hendak dituju DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam periode 1 (satu) tahun kedepan dan terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Membuat pedoman dan acuan dalam pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan agar dapat bermanfaat secara optimal bagi aparatur DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan.
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2021-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Bengkulu.
3. Memberikan aturan dan prosedur dalam pembinaan teknis dan administrasi pelayanan perizinan.
4. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang akan diselenggarakan.
5. Menjadi dokumen untuk evaluasi kinerja OPD DPMPTSP selama 1 Tahun

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan dokumen Renja, Landasan hukum, Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, kedudukan Renja tahun 2023 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renja dengan dokumen RPJMD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen OPD serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

Evaluasi ini gunanya menguraikan hasil evaluasi kinerja DPMPTSP tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

Mengemukakan hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu serta capaian Renstra DPMPTSP Provinsi Bengkulu serta realisasi APBD DPMPTSP Provinsi Bengkulu berdasarkan program kegiatan yang memenuhi target dan yang tidak memenuhi target ataupun yang telah melampaui target yang direncanakan termasuk faktor penyebab dan tindaklanjut

kebijakan perencanaan dan penganggaran yang telah diambil untuk mengatasi faktor tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Di sub bab ini memaparkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Bengkulu berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Memaparkan tugas dan fungsi OPD dalam mendukung visi dan misi Gubernur Bengkulu termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan kajian program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Bengkulu

BAB III BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Memaparkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok serta fungsi DPMPTSP Provinsi Bengkulu

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran DPMPTSP terkait target kinerja Renstra DPMPTSP

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian terhadap faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi jumlah program dan kegiatan beserta dana yang dibutuhkan.

BAB IV PENUTUP

Memberikan kesimpulan dari hasil Rencana Kerja (RENJA)
DPMPTSP Tahun 2023

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DPMPTSP Provinsi Bengkulu tahun 2023 juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Provinsi Bengkulu tahun 2023 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan dapat dilihat dari Capaian Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan III yaitu :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KET
1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa surat menyurat			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan			

			Penanaman Modal			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
5	Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
6	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
			Penyediaan Layanan			

			Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
--	--	--	--	--	--	--

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Secara umum Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan studi pengukuran kualitas pelayanan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu yang telah diterima oleh *stakeholder* atau masyarakat pemohon perizinan. Berdasarkan analisa dan pengolahan data yang disimpulkan dalam nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversi dengan skor rata-rata selama 1 (satu) tahun adalah 89,6 nilai interval konversi **A** tergolong dalam mutu pelayanan dengan kategori kinerja pelayanan **Sangat Baik**.

Penilaian Kinerja SKM yang dinilai dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester dengan sasaran obyek survey adalah para pemohon perizinan non perizinan yang proses perizinan non perizinannya telah selesai dan akan diambil oleh pemohon yang bersangkutan. Profil responden selama tahun 2020 diwakili oleh 300 orang responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, kepentingan perizinan, dan pekerjaan.

Adapun Program dan kegiatan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang mendukung pencapaian meningkatnya indeks kepuasan masyarakat adalah :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen (%)
Program : Pelayanan Penanaman Modal			
Kegiatan : Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	29.263.200	9.560.000	33 %
Total	29.263.200	9.560.000	33 %

Dari table di atas untuk Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan didapati bahwa realisasi anggaran hampir tidak dapat diserap karena relokasi anggaran yang dilakukan sehingga dua kegiatan terdampak dan tidak bisa dilaksanakan. Untuk tetap menjalankan tugas yang ada DPMPTSP Provinsi Bengkulu melakukan survey dan penghitungan secara mandiri.

Sebagai bahan pertimbangan ada beberapa faktor penghambat pencapaian realisasi dari target yang harus segera dibenahi adalah:

1. Ekstern, belum terbukanya masyarakat untuk membuat aduan terkait pelayanan yang diterimanya.
2. Intern, belum terakomodirnya sistem pengaduan dengan menggunakan sistem teknologi terkini.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dianggap cukup signifikan dalam pencapaian target realisasi penting untuk dapat dipertahankan yaitu :

1. Faktor internal yaitu adanya loket pengaduan yang disediakan dari bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan perizinan untuk menampung keluhan/saran/kritikan dari masyarakat.
2. Adanya kegiatan penggunaan sistem informasi dan kepuasan masyarakat secara elektronik yang menunjang pelaksanaan kedua item di atas.
3. Telah adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu dengan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu untuk pengawasan terhadap pelayanan publik.
4. Adanya kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu dalam hal ini seksi pengaduan dan kepuasan masyarakat dengan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Telah dibentuknya Satgas Pengaduan di Bidang Pengaduan DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang tujuannya untuk dapat menyelesaikan masalah perizinan.

Keberhasilan dalam penyelesaian kasus pengaduan masyarakat adalah ukuran dimana jumlah pengaduan yang masuk berbanding lurus dengan kasus pengaduan yang terselesaikan. Penanganan pengaduan masyarakat tahun 2021 mencapai 100 % yaitu dengan mengakomodir keluhan pemohon / pelanggan yang masuk melalui pengaduan langsung/tatap muka, email dan sms pengaduan.

Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Dilayani

Sebelumnya DPMPTSP Provinsi Bengkulu hanya memiliki wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan sejumlah 212 jenis dari 14 sektor terkait. Namun sejak awal Maret 2018 dengan dorongan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah dilimpahkan sebanyak 223 jenis perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bengkulu yang terbit berdasarkan **Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 Tanggal 30 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu** maka izin yang dikeluarkan sejumlah **223 izin dari 17 sektor terkait**. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing jenis izin atau nonizin.

Adapun jumlah perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebanyak Jumlah perizinan yang telah diterbitkan sebanyak **6.257 izin (2019) dan 7.045 izin (2020)** yang diproses melalui aplikasi daerah Sipanse dan melalui sistem **Online Single Submission (OSS)**, (termasuk NIB dari sektor UMKM yang dibawah 500 Juta).

Adapun Program dan kegiatan/subkegiatan yang mendukung jumlah perizinan dan nonperizinan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen (%)
Program : Pelayanan Penanaman Modal			
Kegiatan : Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota			

Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	53.081.000	41.006.320	77 %
Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	147.999.800	144.056.000	97 %
TOTAL	201.080.800	185.062.320	87 %

- Tercapainya target 223 jumlah perizinan dan nonperizinan yang dilayani adalah dikarenakan oleh beberapa faktor :
 1. Terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 2. Faktor internal yaitu adanya SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang jelas untuk tiap-tiap jenis perizinan yang dipatuhi oleh pegawai DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin.
 3. Faktor eksternal tercapainya sinkronisasi data perizinan / non perizinan yang ada di OPD yang terkait bidang perizinan adalah mulai adanya kebijakan kementerian sektoral untuk memberikan tembusan kebijakan atau peraturan terkait perizinan terbaru kepada OPD teknis di daerah dan kepada PTSP di daerah sehingga adanya persamaan rujukan atau acuan terhadap aturan penerbitan perizinan yang terbaru.
 4. Adanya pendampingan oleh Tim Korsupgah KPK RI hingga menginisiasi untuk munculnya pelayanan perizinan secara elektronik dan online.
- Faktor yang menghambat proses perizinan / non perizinan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah :

1. Faktor eksternal yaitu kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis OPD terkadang berjalan lambat dan kurangnya personil teknis seperti Ahli Ukur Kapal, Ahli Kehutanan, Ahli Gedung Bangunan dll.
2. Masalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) karena Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu belum memiliki RDTR.
3. Faktor internal yang masih menghambat proses perizinan dan nonperizinan adalah jumlah SDM pendukung seperti Tenaga Programmer Komputer dan Tenaga IT lainnya untuk memback up sitem aplikasi yang ada.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah perlu adanya evaluasi dan koordinasi bersama Tim Teknis OPD terkait perizinan, untuk melakukan survey penerbitan perizinan, serta lebih menggiatkan sosialisasi terhadap sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon.



Program Jemput Bola Perizinan bagi perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja dan yang memiliki nilai realisasi investasi cukup besar, seluruh perizinan yang dibutuhkannya akan dijemput dan diantarkan secara gratis.

Salah satu reformasi yang dilakukan di DPMPPTSP Provinsi Bengkulu adalah melalui perizinan yang dilayani secara elektronik pada **223 jenis izin** yang telah dilimpahkan ke DPMPPTSP Provinsi Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi saat ini yang memudahkan setiap orang untuk berurusan dalam hal perizinan dan diharapkan dengan berbagai kemudahan yang disediakan akan mampu mendorong masyarakat untuk mengurus berbagai perizinan dasar maupun perizinan investasi. Kedepan DPMPTSP Provinsi Bengkulu akan terus mengupayakan hingga seluruh perizinan dapat dilayani melalui sistem pelayanan secara *online* bahkan telah dipersiapkan penggunaan tanda tangan digital untuk mempercepat proses perizinan. Dengan sistem pelayanan secara elektronik dipastikan juga bahwa rentang waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan dapat dipangkas sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penerbitan suatu izin.

Dalam menjalankan program dan kegiatan untuk menekan rata-rata lamanya penerbitan surat perizinan dan nonperizinan juga telah diupayakan dengan memaksimalkan kegiatan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan dan Nonperizinan yang bermaksud untuk merangkul aparatur penyelenggara perizinan baik yang ada pada dinas / OPD terkait perizinan lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun aparatur penyelenggaraan perizinan yang ada di Kabupaten / kota sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi dan pandangan terhadap pemangkasan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perizinan dari sisi kinerja aparatur penyelenggaranya. Namun demikian untuk dapat memangkas rata-rata lamanya penerbitan perizinan & nonperizinan tersebut masih terkendala dengan beberapa hal antara lain :

- a. Produk perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu merupakan satu kesatuan dari rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh OPD dinas terkait perizinan. Untuk menjalin ikatan kerjasama yang baik terkadang masih sulit diwujudkan terutama perizinan yang membutuhkan kajian teknis dimana harus melalui survey, dan survey tersebut tidak terlepas dari pendanaan untuk tim yang akan diberangkatkan. Kondisi DPMPTSP dengan anggaran yang tergolong minim terkadang tidak

memungkinkan jika harus menanggung beban biaya survey dimana jumlah permohonan yang membutuhkan kajian teknis dalam kuantitas tinggi.

- b. Tanggungjawab yang diemban petugas pelayanan juga masih terlalu berat jika dibandingkan dengan insentif yang diberikan. Petugas layanan adalah pintu masuk dan pintu keluarnya produk perizinan yang akan digunakan selama tahunan sehingga dituntut untuk memiliki ketelitian dan kinerja yang tinggi dalam memproses suatu perizinan.
- c. SOP yang merupakan dasar bagi setiap permohonan perizinan dan nonperizinan untuk dapat diproses pemberkasannya telah memuat standar waktu yang diperlukan untuk terbitnya suatu izin. Namun, SOP tersebut merupakan produk bersama yang dihasilkan oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis terkait perizinan yang secara teknis telah dievaluasi bersama bahkan dikaji ulang secara terus menerus untuk dapat disederhanakan lagi baik dari segi waktu yang dibutuhkan bagi pemrosesan suatu izin maupun dari persyaratan lainnya. Jumlah SOP yang dirangkum menjadi 1 (satu) dokumen SOP yang berisi 223 jenis perizinan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, untuk lamanya waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses perizinan DPMPTSP Provinsi Bengkulu hanya dapat memangkas waktu yang menjadi kewenangannya berupa pemeriksaan berkas, pengagendaan surat dan penyerahan surat izin saja, sementara porsi terbesar dari waktu penyelesaian adalah wewenang OPD Teknis terkait perizinan yang diluar wewenang DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

Indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu melalui kegiatan investasi tergambar jelas peningkatannya sejak beberapa tahun belakangan ini. Untuk Tahun 2020 dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang di *release* secara resmi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI posisi Provinsi Bengkulu dalam realisasi proyek baik PMDN dan PMA di Provinsi Bengkulu.

Sampai dengan Triwulan keempat tahun 2020 realisasi Investasi di Provinsi Bengkulu mencapai **8,1 Trilyun**. Sedangkan target yang sudah ditetapkan tahun 2020 untuk DPMPTSP Provinsi Bengkulu sebesar 5,9 Trilyun. Realisasi yang telah tercapai pada Tahun 2020 artinya telah mengawali pencapaian realisasi dengan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP. Hal ini juga ikut mendongkrak posisi Realisasi Investasi secara nasional dan Regional yang pada tahun sebelumnya, Realisasi Investasi Provinsi Bengkulu berdasarkan lokasi secara regional Sumatera menduduki **peringkat VI (2018)** dan naik menjadi **peringkat V (2019 dan 2020)** dan masih tetap optimis untuk tahun 2021 realisasi investasi akan terus tumbuh dan meningkat di Provinsi Bengkulu. (Sumber data : Press Realese BKPM RI Realisasi Januari-Desember 2020)

PMDN			PMA		
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	NO	LOKASI	INVESTASI (Usd Miliar)
1	Jawa Timur	55.600,8	1	Jawa Barat	4.793,7
2	Jawa Barat	51.400,5	2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.613,3
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	42.054,7	3	Maluku Utara	2.409,0
4	Bali	34.117,8	4	Riau	2.143,6
5	Banten	31.145,7	5	Sulawesi Tengah	1.770,0
6	Jawa Tengah	30.600,1	6	Kepulauan Riau	1.649,4
7	Kalimantan Timur	25.034,0	7	Jawa Timur	1.575,5
8	Sumatera Utara	18.189,5	8	Sumatera Selatan	1.543,9
9	Sumatera Selatan	15.824,5	9	Jawa Tengah	1.363,6
10	Kepulauan Riau	14.249,0	10	Sulawesi Tenggara	1.266,6
11	Kalimantan Barat	9.256,5	11	Bali	1.076,0
12	Sulawesi Selatan	8.142,0	12	Sumatera Utara	974,8
13	Aceh	8.241,1	13	Kalimantan Barat	750,3
14	Lampung	7.120,5	14	Papua	567,7
15	Nusa Tenggara Barat	6.582,4	15	Lampung	498,4
16	Bali	5.412,7	16	Kalimantan Timur	376,0
17	Bengkulu	5.399,2	17	Nusa Tenggara Barat	302,1
18	Sulawesi Tengah	5.261,3	18	Bali	293,3
19	Kalimantan Selatan	4.286,3	19	Kalimantan Selatan	240,8
20	Kalimantan Tengah	3.710,0	20	Sulawesi Selatan	236,1
21	Jambi	3.511,7	21	Bengkulu	192,3
22	Sumatera Barat	3.106,2	22	Kalimantan Tengah	177,6
23	Nusa Tenggara Timur	3.020,5	23	Maluku	176,7
24	Sulawesi Utara	3.005,6	24	Sulawesi Utara	155,7
25	Sulawesi Tenggara	2.865,7	25	Sumatera Barat	125,6
26	Papua	2.722,2	26	Nusa Tenggara Timur	81,3
27	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.683,4	27	Kalimantan Utara	68,4
28	Kalimantan Utara	2.235,2	28	Gorontalo	67,6
29	Papua Barat	1.925,4	29	Aceh	51,1
30	Kepulauan Bangka Belitung	1.863,8	30	Kepulauan Bangka Belitung	48,4
31	Gorontalo	683,6	31	Jambi	27,0
32	Maluku Utara	662,1	32	Papua Barat	16,6
33	Maluku	474,8	33	Daerah Istimewa Yogyakarta	8,7
34	Sulawesi Barat	252,9	34	Sulawesi Barat	6,5
TOTAL		413.355,5	TOTAL		28.666,3

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen (%)
Program Promosi Penanaman Modal			
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	525.500.000	41.571.000	8 %
Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.619.000	29.557.500	97%
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20.120.000	20.120.000	100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	488.267.000	331.450.000	68 %
TOTAL	1.064.506.000	422.698.500	39,7 %

- Tercapainya realisasi Investasi di Provinsi Bengkulu mencapai **8,1 Trilyun** melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5,9 Trilyun hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor :

1. Faktor internal

- 1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal yang di undangkan tanggal 25 September 2017 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 (Nomor Registrasi Perda Provinsi Bengkulu : 8/208/207).

Dalam Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal dalam BAB XII tentang Insentif dan kemudahan Penanaman Modal dalam Pasal 37 tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan Pelaporan kegiatan usahanya kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam hal ini berupa **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi Penanaman Modal dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.**

- 2) Telah terbentuknya Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu berdasarkan Pergub Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 yang di dalamnya **tercantum peran penanaman modal dalam pelayanan perizinan.**
- 3) Adanya proses pembinaan, pemantauan dan pengawasan PMA dan PMDN yang dilakukan terus menerus oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu sebagai pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah, sehingga laporan realisasi investasi melalui system LKPM Online mengalami peningkatan, dalam hal ini disebabkan

adanya pembinaan terhadap aparaturnya DPMPTSP Kab/Kota dan investor PMA dan PMDN

2. Faktor eksternal

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa setiap pelaku usaha perseorangan dan non perseorangan wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).
- 2). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang telah terintegrasi dalam aplikasi OSS (Online Sub System).

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa pameran investasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi wabah Covid-19 yang melanda dunia. Namun promosi online secara tidak langsung (*indirect selling*) dalam bentuk video potensi investasi di Provinsi Bengkulu tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu, tidak hanya menargetkan pangsa pasar domestik saja tetapi juga kepada penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Provinsi Bengkulu serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.

Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah dan Dunia Usaha Tahun Anggaran 2020 juga tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan ini berbasis meeting atau pertemuan untuk menjembatani Investor dengan

UMKM sebagai layer kedua pendukung keberadaan investor itu sendiri. Sedianya kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yaitu Pengentasan Kemiskinan & Perentasan Ketertinggalan (Prioritas 1) melalui Penggalian potensi serta optimalisasi keterlibatan antara pemerintah dan dunia usaha sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan terpadu. Dalam hal ini mendorong efektivitas program pemberdayaan masyarakat sekitar di lingkungan Perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melakukan kegiatan investasinya di Provinsi Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu khususnya dalam mendukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Perentasan Ketertinggalan di 7 (tujuh) Desa Nelayan yang masuk dalam program Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) berbasis Agro-Maritim.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan OPD teknis
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
4. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

5. Adanya perubahan/rasionalisasi anggaran dan relokasi anggaran akibat wabah Covid 19 yang melanda dunia, sehingga target yang sebelumnya ditetapkan tidak dapat tercapai.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Provinsi dalam pelaksanaan Pelayanan perizinan/ non perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mendorong meningkatnya nilai investasi, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang diharapkan daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM RI diantaranya:

- 1) Perbedaan Data Realisasi Investasi antara BKPM RI, DPMPTSP Prov dan Kab/Kota
 - a. Adanya regulasi tentang OSS yang belum terintegrasi dengan SPIPISE.
 - b. NSPK Kementerian sektoral yang belum seluruhnya diterbitkan.
 - c. Perlunya kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh BKPM RI untuk menyamakan data yang secara manual sehingga bisa diinput secara online.
 - d. Perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan anggaran APBN berkenaan dengan bidang pelaksanaan penanaman modal baik melalui dekon, DAK, dan TP sebagai wadah penguatan kelembagaan dan fungsi penanaman modal di daerah.
 - e. Perlu dukungan pendanaan ke daerah untuk penyusunan RDTR.
 - f. Perlunya sosialisasi bagi internal aparaturnya pengelola perizinan dan penanaman modal untuk pelaksanaan OSS RBA
- 2) Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM masih rendah
 - a. Perlu adanya harmonisasi peraturan Kementerian Sektor berkenaan dengan penerbitan izin usaha sektoral berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
 - b. Peningkatan sosialisasi penerapan OSS RBA bagi para pelaku usaha.
- 3) Komitmen Manajemen terhadap SDM Terampil dan Sarana Prasarana Penunjang

- a. Agar ada instruksi BKPM RI kepada Gubernur, Bupati & Walikota se-Indonesia untuk berkomitmen terhadap SDM yang telah dilatih dengan tidak melakukan mutasi dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun, dan memberikan kesejahteraan (*reward*)
 - b. Adanya kebijakan dari BKPM RI terhadap daerah-daerah yang berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan tambahan anggaran APBN melalui dana Dekon, DAK dan TP sehingga memunculkan motivasi bagi daerah untuk memperbaiki layanan bidang penanaman modal.
- 4) Kebijakan terkait pembinaan organisasi dan teknis belum terharmonisasi dengan baik
- a. Adanya regulasi yang harmonis antara BKPM RI, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sektor berkenaan dengan penguatan kelembagaan DPMPTSP Prov, Kab/Kota
 - b. Adanya KEBIJAKAN antara kementerian dalam negeri dan BKPM RI untuk membuat pedoman penyelenggaraan bidang penanaman modal dan PTSP untuk daerah sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk FORUM DPMPTSP Tingkat Provinsi s.d Tingkat Pusat

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang membantu Gubernur Bengkulu, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam peningkatan kualitas produk perizinan/non perizinan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan penerbitan perizinan yang sesuai Standar Operasional Prosedur;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan non perizinan
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada lampiran **Tabel T-C 30 (Terlampir)**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, DPMPTSP Provinsi Bengkulu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan / non perizinan, diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi mengenai DPMPTSP Provinsi Bengkulu melalui media elektronik & website www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan/non perizinan
3. Meningkatnya pelayanan perizinan/ non perizinan yang dapat terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang selalu meningkat dan selalu pada kategori A (sangat baik).
4. Terciptanya pelayanan penanaman modal serta perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah

Adapun Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan TUPOKSI DPMPTSP Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Kerjasama yang terjalin dengan OPD terkait belum sepenuhnya berjalan dengan baik walaupun DPMPTSP Provinsi Bengkulu telah memiliki pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan/non perizinan sebanyak 223 jenis.

2. Perhatian dari Kepala Daerah terhadap kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia DPMPTSP yang masih kurang. Padahal secara tidak langsung, kinerja pelayanan DPMPTSP Provinsi ikut mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertera dalam RPJMD Provinsi Bengkulu terkait dengan program pelayanan publik.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI DPMPTSP yang masih kurang, dikarenakan dana yang dianggarkan untuk DPMPTSP masih sangat kurang.
4. Belum tersentralisirnya sistem *e-government* baik dari sisi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, terlalu banyak sistem aplikasi yang digunakan namun tidak saling mendukung atau tidak ada *link* antara satu sistem dengan sistem lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan, hal ini tertuang dalam PERDA No 08 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2008. Berdasarkan tugas pokok DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu terhadap masyarakat yang bersifat administratif sehingga sampai tahun 2020 usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat belum ada. Rancangan Awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan yang telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada Visi dan Misi serta rencana pencapaian tahun 2023. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Bengkulu untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-

penyesuaian yang dilakukan tentunya tetap harus mengacu pada Visi Misi kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi-misi.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaian. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

Analisis rencana strategis DPMPTSP Provinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama OPD terkait belum optimal
3. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan non perizinan.

4. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
5. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi DPMPTSP Provinsi Bengkulu program dan kegiatan yang mengikat dan terlalu rigid.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan setelah ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Provinsi Bengkulu, Untuk lebih mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Bengkulu maka diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Pada Program Promosi Penanaman Modal perlu adanya penambahan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemerintah dan Dunia Usaha, hal ini bertujuan untuk menjembatani hubungan timbal balik antara Investor besar dan pelaku usaha UMKM, Investor akan membutuhkan supply bahan baku yang bisa disediakan oleh UMKM di Provinsi Bengkulu. Akan diwajibkan bagi seluruh Investor yang akan berusaha di Provinsi Bengkulu untuk menggandeng mitra UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu sesuai dengan bidang usahanya, sehingga akan ada sistem hubungan kerja yang saling menguntungkan antara para Investor dan pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalam Rancangan RKPD Provinsi Bengkulu untuk DPMPTSP hal ini belum dapat diakomodir karena keterbatasan pagu anggaran yang diberikan.
2. Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perlu adanya kegiatan Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Penanaman Modal yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan para investor yang telah mendapat persetujuan berusaha di Provinsi Bengkulu namun belum melakukan progress atau tahapan konstruksi, hanya sebatas mengantongi izin untuk berusaha. Hal-hal inilah yang perlu didorong agar dapat diketahui faktor apa yang membuat para investor dengan beberapa proyek yang direncanakan belum juga merealisasikan usahanya. Dalam Rancangan Awal RKPD 2023 hal ini juga belum dapat diakomodir karena jumlah pendanaan yang minim.

3. Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal juga perlu didukung oleh Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, yang bertujuan untuk memberikan insentif peluang kemudahan berusaha di Provinsi Bengkulu dari sisi regulasi yang ada. Kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mendorong pemberian kemudahan-kemudahan bagi para investor yang akan membuka usahanya di Provinsi Bengkulu. Minat para investor juga dipengaruhi oleh kondisi atau kebijakan di suatu daerah, semakin mudah regulasi atau kebijakan daerah maka kesanalah pilihan para investor untuk berusaha. Setiap daerah saat ini bersaing untuk menarik minat para investor agar membuka usaha di wilayah mereka yang secara otomatis akan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayahnya, salah satu jalan terbaik yang ditawarkan adalah dari sisi kebijakan atau regulasi yang memberikan keringanan atau insentif bagi para investor.
4. Selanjutnya pada Program Pelayanan Penanaman Modal juga perlu dimunculkan kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Layanan, hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perizinan yang mereka ajukan, ataupun kendala yang dihadapi masyarakat yang telah lama berusaha namun belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan bagi usaha mereka.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel T-C 31 (Terlampir)**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu kebijakan nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan investasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu.

Arah kebijakan nasional yang berdasarkan pada RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021 – 2026 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok DPMPTSP Provinsi Bengkulu tertuang pada *Misi ke 1 (satu) Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif; Misi ke 3 (tiga) Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan professional serta transformasi pelayanan publik;*

Arah kebijakan nasional yang diambil untuk tahun 2021 berupa refocussing anggaran untuk penanganan wabah Covid 19 dan pemulihan ekonomi secara langsung berdampak pada capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Beberapa program dan kegiatan dihapuskan dan beberapa lainnya tidak dapat dilaksanakan, hal ini berpengaruh besar terhadap target realisasi investasi yang telah disusun. Seyogyanya sektor investasi bisa menjadi pendongkrak utama untuk pemulihan ekonomi pasca terpuruknya perekonomian negara dan dunia akibat dari wabah covid 19. Namun dengan segala keterbatasan DPMPTSP Provinsi Bengkulu tetap mencoba untuk mengawal realisasi investasi dan memberikan pelayanan perizinan dengan sebaik mungkin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Tujuan dari misi-misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas dirumuskan menjadi “Meningkatnya tata kelola kinerja OPD; Meningkatnya Investasi; Meningkatnya Pelayanan Publik.” Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD diukur melalui Nilai Sakip OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Meningkatnya Investasi yang diukur melalui indikator kinerja Jumlah Kebijakan yang mendukung Perbaikan kemudahan memulai berusaha, Jumlah fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Nilai Rencana Investasi yang disetujui per tahun, Persentase Laju Investasi pertahun dan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal, Jumlah Kesepakatan/Perjanjian kerjasama penanaman modal, Frekuensi Publikasi/ *branding image* investasi pada media publik skala nasional dan internasional, Profil Proyek yang siap ditawarkan dan Kajian yang mendukung penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Pelayanan Perizinan Terpadu, Jumlah Jenis Perizinan/nonperizinan yang dilayani serta Jumlah Jenis Perizinan/Nonperizinan Yang Dilayani Secara Online.

Tabel berikut ini memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sesuai indikator di atas. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP
Meningkatnya Investasi	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Bengkulu dibuat dengan berdasarkan RPJMN dan Program Prioritas Nasional dan disesuaikan dengan visi misi Kepala Daerah. Pada tahun 2023 program yang diusulkan sebanyak 6 (enam) program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan. Program usulan tersebut menitikberatkan pada pemberian pelayanan perizinan dan investasi dan perizinan/non perizinan secara maksimal kepada pemohon. Namun dalam Renja 2023 ini akibat adanya refocussing anggaran beberapa kegiatan dan sub kegiatan pendukung capaian RPJMD Provinsi Bengkulu dan pendukung capaian IKU DPMPTSP Provinsi Bengkulu ditunda pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang tersisa yang bersumber pendanaan tersebut berasal dari APBD provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel T-C 33 (Terlampir)**

BAB IV PENUTUP

Penyusunan RENJA tahun 2023 yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu, Rencana Kerja Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara umum sudah dipaparkan serta berpedoman terhadap RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJPD Provinsi Bengkulu.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu tahun 2023 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu diharapkan adanya perhatian dari para *stakeholder* agar dapat memberikan anggaran dana sesuai dengan yang telah diusulkan di dalam RENJA 2023 ini. Hal ini dikarenakan TUPOKSI dari DPMPTSP berhubungan langsung dengan masyarakat yang berdampak pada penilaian masyarakat terhadap penciptaan *Good Government* Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan beberapa pihak di luar DPMPTSP Provinsi Bengkulu seperti OPD

Teknis terkait perizinan, LSM, Akademisi terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan DPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.

Kami sangat mengharapkan agar RENJA DPMPTSP Provinsi Bengkulu ini dapat menjadi perhatian lebih dari pihak-pihak terkait demi tercapainya visi & misi Kepala Daerah serta peningkatan kinerja dan pelayanan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 13 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

K A R M A W A N T O, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199203 1 002

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja - OPD dan Pencapaian Renstra-OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 5

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPPTSP) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2020			Target program dan kegiatan (renja DPMPPTSP tahun 2021)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra DPMPPTSP s/d tahun 2021	
					Target Renja DPMPPTSP tahun 2020	Realisasi Renja OPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Jenis Pelayanan Adm Perkantoran yg dilaksanakan	14 Keg	11 Keg	11 Keg	11 Keg	100%	11 Keg	14 Keg	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat terkirim	9000	4500	4500	4500	100%	4500	9000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	98 jenis	49 jenis	49 jenis	49 jenis	100%	49 jenis	98 jenis	100%
	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	58 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%	29 Jenis	58 Jenis	100%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis						20 Jenis	100%
	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga & Kebersihan	12 bulan						12 bulan	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulab	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Kebutuhan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi	70 kali	70 kali	30 kali	30 kali	100%	30 kali	12 kali	17,4%
	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Teknis Perkantoran	15 Pegawai	15 Pegawai	15 Pegawai	15 Pegawai	100%	15 Pegawai	15 Pegawai	100%
	Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah partisipasi pada even2 khusus daerah	12 Bulan							
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yg dibangun/rehab/pelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Dinas Roda 4 dan 2	2 unit	2 unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
	Pengadaan Interior dan Meubeleur Ruang Kerja dan Arsip	Jumlah pengadaan Interior dan Meubeler	2 jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	15 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	3 Jenis	15 Jenis	100%
	Pengadaan peralatan Keg E-Government	Jumlah Pengadaan Peralatan E-Gov	25 Jenis					25 Jenis	25 Jenis	100%

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			89,58	90	91	92	89,60	90	91	92	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		Melakukan pendataan tentang penilaian pemohon terhadap kinerja pelayanan perizinan non perizinan dan melakukan pelayanan atas pengajuan keberatan para pemohon sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja	89,58	90	91	92	89,60	90	91	92	
2	Jumlah Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat		Melakukan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat terkait perizinan/nonperizinan	25	25	25	25	25	25	25	25	
	Jumlah Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani			223	223	223	223	223	223	223	223	
1	Jumlah izin yg dikembangkan secara elektronik		Melakukan pengembangan terkait dengan perizinan dan non perizinan secara elektronik	223	223	223	223	223	223	223	223	
2	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota		Melakukan pembinaan PTSP di 10 kab/kota Prov.bengkulu dan melaksanakan/mengikuti rakor PTSP nasional	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	
3	Survey dan Pemeriksaan Prasyarat Perizinan		Melakukan survey dan pemeriksaan prasyarat perizinan	70 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 Kali	50 Kali	50 kali	50 kali	

TABEL T.C 3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Bengkulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan PD:		Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP	A	12,947,200,000	Tujuan PD:		Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP	A	13,020,000,000	
	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD					Meningkatnya tata kelola kinerja OPD					
	Sasaran PD:		Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP	A	12,947,200,000	Sasaran PD:		Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP	A	13,020,000,000	
	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD					Meningkatnya tata kelola kinerja OPD					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Bengkulu	Nilai persentase administrasi yg dilaksanakan	100%	12,947,200,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Bengkulu	Nilai persentase administrasi yg dilaksanakan	100%	13,020,000,000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan jumlah pelaksanaan evaluasi pelaporan	2 jenis	280,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan jumlah pelaksanaan evaluasi pelaporan	2 jenis	280,000,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	6 Dokumen	75,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	6 Dokumen	75,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	1 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	1 Dok	15,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA	1 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA	1 Dok	15,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA	1 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OPD	Bengkulu	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA	1 Dok	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bengkulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja PTSP dan Monitoring Perencanaan Kab/kota	2 Keg	200,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bengkulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian Kinerja PTSP dan Monitoring Perencanaan Kab/kota	2 Keg	125,000,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Yg Dilaksanakan	5 Jenis	1,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Yg Dilaksanakan	5 Jenis	50,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Keg Adm Keuangan daerah yg Dilaksanakan	2 Jenis	11,555,803,500	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Keg Adm Keuangan daerah yg Dilaksanakan	2 Jenis	11,564,803,500	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bengkulu	Jumlah ASN yg Dibayar Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	11,499,803,500	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bengkulu	Jumlah ASN yg Dibayar Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	11,499,803,500	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bengkulu	Jumlah penatausahaan dan verifikasi yg dibayarkan	12 Bulan	55,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bengkulu	Jumlah penatausahaan dan verifikasi yg dibayarkan	12 Bulan	55,000,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bengkulu	Jumlah Pelaporan dan Prognosis anggaran	2 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bengkulu	Jumlah Pelaporan dan Prognosis anggaran	2 Dok	10,000,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Dok Adm Baran yg Disusun	2 Dok	1,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Dok Adm Baran yg Disusun	2 Dok	10,000,000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Dok Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yg Disusun	2 Dok	1,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Dok Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yg Disusun	2 Dok	10,000,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Adm Kepegawaian yg Dilaksanakan	1 Jenis	46,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Adm Kepegawaian yg Dilaksanakan	1 Jenis	55,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bengkulu	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yg Disediakan	100 stel	5,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bengkulu	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yg Disediakan	100 stel	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai	3 Keg	1,000,000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai	1 Keg	15,000,000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bengkulu	Jumlah ASN yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	40,000,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bengkulu	Jumlah ASN yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	40,000,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Adm Umum yg Disediakan	5 jenis	260,650,875	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis Adm Umum yg Disediakan	5 jenis	288,196,500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banunan Kantor	3 Jenis	1,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banunan Kantor	3 Jenis	3,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yg Disediakan	49 Jenis	1,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yg Disediakan	49 Jenis	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Bengkulu	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg disediakan	50 Jenis	1,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Bengkulu	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg disediakan	50 Jenis	15,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yg Disediakan	50 Jenis	90,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bengkulu	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yg Disediakan	50 Jenis	90,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Cetak dan Penggandaan	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen yg dicetak dan penggandaan	10 Jenis	15,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Cetak dan Penggandaan	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen yg dicetak dan penggandaan	10 Jenis	15,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundan-undangan	Bengkulu	Jumlah Jenis bahan Bacaan dan Peraturan yg Disediakan	3 Jenis	5,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundan-undangan	Bengkulu	Jumlah Jenis bahan Bacaan dan Peraturan yg Disediakan	3 Jenis	5,000,000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bengkulu	Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	23,000,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bengkulu	Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	23,000,000	
	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kali	122,650,875	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 kali	127,196,500	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan arsip dinamis yang dilaksanakan	1 Keg	1,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan arsip dinamis yang dilaksanakan	1 Keg	10,000,000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yg Dilaksanakan	2 Keg	1,000,000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bengkulu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yg Dilaksanakan	2 Keg	-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bengkulu	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	5 Jenis	40,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bengkulu	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	5 Jenis	35,000,000	
	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bengkulu	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	1 unit	15,000,000	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bengkulu	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	1 unit	-	
	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bengkulu	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2 jenis	15,000,000	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Bengkulu	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2 jenis	35,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Bengkulu	Jumlah Pengadaan sarana prasarana atau bangunan kantor	1 unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Bengkulu	Jumlah Pengadaan sarana prasarana atau bangunan kantor	1 unit	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bengkulu	Jumlah penyediaan surat menyurat, jumlah jasa komunikasi air dan listrik dan jumlah jasa teknis perkantoran	1 Tahun	617,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bengkulu	Jumlah penyediaan surat menyurat, jumlah jasa komunikasi air dan listrik dan jumlah jasa teknis perkantoran	1 Tahun	617,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Bengkulu	Jumlah penyediaan surat menyurat	4150 surat	7,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Bengkulu	Jumlah penyediaan surat menyurat	4150 surat	7,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber data Air dan Listrik	Bengkulu	Jumlah Pembayaran air listrik dan telepon	12 bulan	160,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber data Air dan Listrik	Bengkulu	Jumlah Pembayaran air listrik dan telepon	12 bulan	160,000,000	
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum	Bengkulu	Jumlah jasa teknis perkantoran	14 Orang	450,000,000	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum	Bengkulu	Jumlah jasa teknis perkantoran	14 Orang	450,000,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis BMD yg Dipelihara	3 Jenis	146,745,625	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Bengkulu	Jumlah Jenis BMD yg Dipelihara	3 Jenis	170,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Bengkulu	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan	12 Unit	97,995,625	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Bengkulu	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan	12 Unit	110,000,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bengkulu	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan mesin	16 Unit	27,500,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Bengkulu	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor dan mesin	16 Unit	30,000,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Bengkulu	Jumlah renovasi gedung kantor	1 Paket	21,250,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Bengkulu	Jumlah renovasi gedung kantor	1 Paket	30,000,000	
	Tujuan PD: Meningkatnya Investasi		Nilai Realisasi Investasi	8,92 T	698,300,000	Tujuan PD: Meningkatnya Investasi		Nilai Realisasi Investasi	8,92 T	590,000,000	
	Sasaran PD: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	8,92 T	698,300,000	Sasaran PD: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	8,92 T	590,000,000	
	Progam Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bengkulu	Persentase Cakupan Deregulasi	100 %	198,300,000	Progam Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bengkulu	Persentase Cakupan Deregulasi	100 %	140,000,000	
	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen regulasi dan evaluasi	2 Jenis	98,300,000	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah jenis dokumen regulasi dan evaluasi	2 Jenis	140,000,000	
	Sub Kegiatan ; Penetapan Kebijakan Daerah Dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Bengkulu	Jumlah regulasi yg Disusun	2 Regulasi	98,300,000	Sub Kegiatan ; Penetapan Kebijakan Daerah Dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Bengkulu	Jumlah regulasi yg Disusun	2 Regulasi	140,000,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah Dokumen Regulasi yg Dievaluasi			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah Dokumen Regulasi yg Dievaluasi			
	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Bengkulu	Jumlah Kebijakan Pengembangan Potensi Investasi	2 Jenis	100,000,000	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Bengkulu	Jumlah Kebijakan Pengembangan Potensi Investasi	2 Jenis	-	
	Sub kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah Regulasi yg Disusun	2 Regulasi	100,000,000	Sub kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah Regulasi yg Disusun	2 Regulasi	-	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Bengkulu	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yg Disusun			Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Bengkulu	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yg Disusun			
	Program Promosi Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah Minat Investor	25 Investor%	300,000,000	Program Promosi Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah Minat Investor	25 Investor%	300,000,000	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah Jenis Pelaksanaan Promosi Investasi	1 Jenis	300,000,000	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah Jenis Pelaksanaan Promosi Investasi	1 Jenis	300,000,000	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Investasi			Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Investasi			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah Jenis Publikasi Branding Image ; Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Jenis	300,000,000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah Jenis Publikasi Branding Image ; Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Jenis	300,000,000	
	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Persentase Perusahaan yg Dilakukan Pengendalian	100%	100,000,000	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Persentase Perusahaan yg Dilakukan Pengendalian	100%	50,000,000	
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan	0 Perusahaaa	100,000,000	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Provinsi	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan	10 Perusahaar	50,000,000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pemantauan	15 Perusahaan	100,000,000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pemantauan	15 Perusahaan	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pembinaan			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pembinaan			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan			
	Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bengkulu	Cakupan Informasi Penanaman Modal	100%	100,000,000	Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bengkulu	Cakupan Informasi Penanaman Modal	100%	100,000,000	
	Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal yg Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah Jenis Informasi Penanaman Modal	1 Jenis	100,000,000	Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal yg Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah Jenis Informasi Penanaman Modal	1 Jenis	100,000,000	
	Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis informasi penanaman modal yg disediakan	1 Jenis	100,000,000	Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis informasi penanaman modal yg disediakan	1 Jenis	100,000,000	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai B(3,92)	204,500,000.00	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai B(3,92)	240,000,000.00	
	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai B(3,92)	204,500,000.00	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai B(3,92)	240,000,000.00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Bengkulu	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Penanaman Modal	Indeks 92	204,500,000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Bengkulu	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Penanaman Modal	Indeks 92	240,000,000	
	Kegiatan Penanaman Modal yg ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bengkulu	Jumlah Sektor perizinan yg dilayani	18 Sektor	204,500,000	Kegiatan Penanaman Modal yg ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bengkulu	Jumlah Sektor perizinan yg dilayani	18 Sektor	240,000,000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis izin yg dilayani secara elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun	223 jenis izin; 1 inovasi; 2 SOP	55,000,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis izin yg dilayani secara elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun	223 jenis izin; 1 inovasi; 2 SOP	65,000,000	
	Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan nonperizinan	45 kali	118,125,000	Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan nonperizinan	45 kali	125,000,000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Bengkulu	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	2 Jenis	31,375,000	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Bengkulu	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	2 Jenis	50,000,000	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif daerah	Bengkulu	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif daerah	Bengkulu	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah			
	Kegiatan : Penanaman Modal yg Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah jenis peningkatan pelayanan perizinan yg dilaksanakan		-	Kegiatan : Penanaman Modal yg Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bengkulu	Jumlah jenis peningkatan pelayanan perizinan yg dilaksanakan		-	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis izin yg dilayani secara elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun			Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bengkulu	Jumlah jenis izin yg dilayani secara elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun			
	Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan			Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Bengkulu	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan : Penyediaaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Bengkulu	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat			Sub Kegiatan : Penyediaaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Bengkulu	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif daerah	Bengkulu	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah			Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif daerah	Bengkulu	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah			
TOTAL					13,850,000,000					13,850,000,000	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI BENGKULU

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan PD:	Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP		A			A	
	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD							
	Sasaran PD:							
	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah jenis Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Bengkulu	100%	13,020,000,000		100%	13,228,000,000
	<i>Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah jenis dokumen perencanaan dan jumlah pelaksanaan evaluasi pelaporan</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>2 jenis</i>	<i>280,000,000</i>		<i>2 jenis</i>	<i>281,000,000</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Bengkulu	6 dok	75,000,000		6 Dok	76,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA OPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA	Bengkulu	1 dok	15,000,000		1 dok	15,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA OPD	Jumlah penyusunan dokumen perubahan RKA						
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA OPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA	Bengkulu	1 dok	15,000,000		1 dok	15,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA OPD	Jumlah penyusunan dokumen perubahan DPA						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja PTSP dan monitoring	Bengkulu	2 keg	125,000,000		2 keg	125,000,000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Bengkulu	5 jenis	50,000,000		5 jenis	50,000,000
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah jenis keg adm keuangan daerah yg dilaksanakan</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>2 jenis</i>	<i>11,564,803,500</i>		<i>2 jenis</i>	<i>11,570,000,000</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan gaji dan tunjangan	Bengkulu	14 bulan	11,499,803,500		14 bulan	11,500,000,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi yg dibayarkan	Bengkulu	12 bulan	55,000,000		12 bulan	60,000,000
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan prognosis anggaran	Bengkulu	2 dok	10,000,000		2 dok	10,000,000

			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adm barang milik daerah SKPD yg disusun	Bengkulu	2 dok	10,000,000		2 dok	10,000,000
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dok penatausahaan barang milik daerah SKPD yg disusun	Bengkulu	2 dok	10,000,000		2 dok	10,000,000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis adm kepegawaian yg dilaksanakan	Bengkulu	1 jenis	55,000,000		1 jenis	80,000,000
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut yg disediakan						
			Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan kinerja pegawai	Bengkulu	3 Keg	15,000,000		3 Keg	15,000,000
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bengkulu	12 Orang	40,000,000		12 Orang	65,000,000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis adm umum yg disediakan	Bengkulu	5 jenis	288,196,500		5 jenis	334,500,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banunan kantor	Bengkulu	3 jenis	3,000,000		3 jenis	3,000,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan						
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg disediakan	Bengkulu	50 jenis	15,000,000		50 jenis	15,000,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Bengkulu	50 jenis	90,000,000		50 jenis	105,000,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	Bengkulu	10 Jenis	15,000,000		10 jenis	20,000,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yg disediakan	Bengkulu	3 jenis	5,000,000		3 jenis	6,500,000
			Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanana dan minuman tamu	Bengkulu	12 bulan	23,000,000		12 bulan	25,000,000
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bengkulu	20 kali	127,196,500		20 kali	150,000,000
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penatusahaan arsip dinamis yang dilaksanakan	Bengkulu	1 keg	10,000,000		1 keg	10,000,000
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yg dilaksanakan						

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Bengkulu	5 jenis	35,000,000		5 jenis	126,896,500
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan						
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Bengkulu	5 jenis/unit	35,000,000		5 jenis/unit	126,896,500
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasarana atau bangunan kantor						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan surat menyurat, jumlah jasa komunikasi air dan listrik serta jumlah jasa teknis perkantoran	Bengkulu	1 tahun	617,000,000		1 tahun	632,500,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Bengkulu	4150 surat	7,000,000		4150 surat	7,500,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi air dan listrik	Bengkulu	12 bulan	160,000,000		12 bulan	165,000,000
			Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah jasa teknis perkantoran	Bengkulu	14 orang	450,000,000		14 orang	460,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD yg dipelihara	Bengkulu	3 jenis	170,000,000		3 jenis	193,103,500
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan	Bengkulu	12 unit	110,000,000		12 unit	110,000,000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor	Bengkulu	16 unit	30,000,000		16 unit	30,000,000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah renovasi gedung kantor	Bengkulu	1 paket	30,000,000		1 paket	53,103,500
			Tujuan PD: Meningkatnya Investasi	Nilai Realisasi Investasi		8,92 T			9,2 T	
			Sasaran PD: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)		8,92 T			9,2 T	
			Progam Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Cakupan Deregulasi	Bengkulu	100%	140,000,000		100%	140,000,000
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah jenis dokumen regulasi dan evaluasi	Bengkulu	2 jenis	140,000,000		2 jenis	140,000,000
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah regulasi yang disusun	Bengkulu	2 regulasi	140,000,000		2 regulasi	140,000,000
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen reulasi yang dievaluasi						
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kebijakan pengembangan potensi investasi			-			-
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah regulasi yg disusun						

			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yg disusun						
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat investor	Bengkulu	25 Investor	300,000,000		25 Investor	342,000,000
			<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah jenis pelaksanaan promosi investasi</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>1 jenis</i>	<i>300,000,000</i>		<i>1 jenis</i>	<i>342,000,000</i>
			Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi investasi						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis publikasi branding image ; jumlah pelaksanaan promosi investasi	Bengkulu	2 jenis	300,000,000		2 jenis	342,000,000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yg dilakukan pengendalian	Bengkulu	100%	50,000,000		100%	100,000,000
			<i>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan pembinaan dan pemantauan</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>15 perusahaan</i>	<i>50,000,000</i>		<i>20 perusahaan</i>	<i>100,000,000</i>
			Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg dilakukan pemantauan	Bengkulu	15 perusahaan	50,000,000		20 perusahaan	100,000,000
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg dilakukan pembinaan						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yg dilakukan pengawasan						
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Informasi Penanaman Modal	Bengkulu	100%	100,000,000		100%	100,000,000
			<i>Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yg Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah jenis informasi penanaman modal</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>1 jenis</i>	<i>100,000,000</i>		<i>1 jenis</i>	<i>100,000,000</i>
			Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis informasi penanaman modal yg disediakan	Bengkulu	1 jenis	100,000,000		1 jenis	100,000,000
			Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP		Nilai B(3,92)			Nilai B (3,92)	
			Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP		Nilai B(3,92)			Nilai B (3,92)	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Penanaman Modal	Bengkulu	Indeks 92	240,000,000		Indeks 93	240,000,000
			<i>Kegiatan Penanaman Modal yg Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah sektor perizinan yg dilayani</i>	<i>Bengkulu</i>	<i>18 sektor</i>	<i>240,000,000</i>		<i>18 sektor</i>	<i>240,000,000</i>
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izinyg dilayani secra elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun	Bengkulu	223 izin; 1 inovasi; 2 SOP	65,000,000		223 izin; 1 inovasi; 2 SOP	65,000,000
			Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan	Bengkulu	45 kali	125,000,000		45 kali	125,000,000
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Bengkulu	2 jenis	50,000,000		2 jenis	50,000,000

			Sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah						
			<i>Kegiatan Penanaman Modal yg Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi</i>	<i>Jumlah jenis peningkatan pelayanan perizinan yg dilaksanakan</i>			-			-
			Kegiatan Penanaman Modal yg Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor perizinan yg dilayani						
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izinyg dilayani secara elektronik; jumlah inovasi layanan; jumlah SOP yg disusun						
			Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan prasyarat perizinan dan non perizinan						
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan	Jumlah jenis penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat						
			TOTAL				13,850,000,000			14,150,000,000